

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta: Selemba Empat, 2011
- Imam Soebehi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2010
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009
- Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Richard Burton, Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: PT Refika 1998
- Soemarso S.R., *Beberapa Faktor Pendorong Keberhasilan Pungutan Pajak di Indonesia*, Jakarta; Pusat Pengkajian Fiskal & Moneter 1996
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Cikal Sakti, 2007

Waluyo, *PerpajakanIndonesia, Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, Edisi 6*, Jakarta: Selemba Empat, 2006

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan restribusi

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2011 tentang
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pemungutan pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Bantul ?
2. Apa sanksi bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telat membayar pajak ?
3. Berapakah presentase jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak kendaraan ?
4. Bagaimanakah pengelolaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT wilayah Kabupaten Bantul ?
5. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam proses pemungutan pajak Kabupaten Bantul ?
6. Faktor apakah yang menjadi pendukung dalam proses pemungutan pajak Kabupaten Bantul
7. Bagaimana cara SAMSAT Bantul untuk menarik Wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar mau membayar Pajak ?